



Peran Aktor Politik Lokal Menguatkan *Civil Society* di Kabupaten Kotawaringin Barat

Arya Pangestu Ramadani ^{a,1}, Nasiwan ^{b,2}

^a Mahasiswa (Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum UNY), Yogyakarta Indonesia

^b Dosen (Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum UNY), Yogyakarta Indonesia

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah: (1) mendeskripsikan bagaimana peran aktor politik local menguatkan *civil society* di Kabupaten Kotawaringin Barat, (2) mengidentifikasi apa saja upaya aktor politik local dalam menguatkan *civil society* di bidang kesadaran dan partisipasi politik di Kabupaten Kotawaringin Barat. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Data primer diambil dari Anggota DPRD, Kepala Kesatuan Kebangsaan dan Politik, dan organisasi kemasyarakatan/LSM di Kotawaringin Barat. Data dikumpulkan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) peran yang dilakukan oleh aktor politik lokal dalam penguatan *civil society* ditandai dengan adanya peningkatan kesadaran dan partisipasi politik *civil society* yang didorong atas peranan dalam pemberdayaan *civil society*, edukasi politik, sosialisasi politik, rapat berkala, keterbukaan dialog serta penyelesaian permasalahan yang terjadi dalam lingkungan politik. (2) upaya aktor politik lokal dalam menguatkan *civil society* antara lain dengan menciptakan keterbukaan ruang public/free public sphere, pemberdayaan *civil society*, pemeliharaan demokrasi, pendanaan serta hibah kepada *civil society*, monitoring, edukasi kesadaran dan partisipasi politik, toleransi atas kemajemukan dan keadilan social.

ABSTRACT

The objective of this research are: (1) to describe the role of local political actors in strengthening civil society in Kotawaringin Regency, (2) to identify the efforts of local political actors in strengthening civil society in the area of political awareness and participation in West Kotawaringin Regency. This research is a qualitative research with the type of case study research. The primary data was taken from DPRD members, heads of Kesbangpol, and community organizations/NGOs in West Kotawaringin. Data collected by interview, observation, and documentation.

The results of the study show that: (1) The role played by local political actors in strengthening civil society is marked by an increase in awareness and political participation of civil society which is driven by roles in empowering civil society, political education, political outreach, regular meetings, open dialogue and solving problems that occur in the political environment. (2) Efforts by local political actors in strengthening civil society include creating open public space/free public sphere, empowering civil society, maintaining democracy, funding and grants to civil society, monitoring, education on political awareness and participation, tolerance for pluralism and justice social.

Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem politik demokrasi, sebagai negara yang menganut sistem politik demokrasi, adanya ruang pembahasan mengenai demokrasi saat ini selalu mengisi perbincangan berbagai lapisan masyarakat mulai dari masyarakat bawah, masyarakat menengah, masyarakat kelas elit seperti kalangan elit politik, birokrat, pemerintahan, tokoh masyarakat, aktivitas lembaga swadaya masyarakat, cendekiawan, mahasiswa dan kaum profesional lainnya.

Sejarah Artikel

Diterima : 22 Desember 2022

Disetujui: 24 Desember 2022

Kata kunci:

Peran Aktor Politik, Aktor Politik Lokal, *Civil Society*

Keywords:

The Role of Political Actors, Local Politic Actors, Civil Society

Secara etimologis istilah demokrasi berasal dari kata Yunani “*demos*” berarti rakyat dan “*kratia*” berarti kewenangan atau mengatur (*rule*), sehingga secara sederhana demokrasi dapat didefinisikan sebagai *rule of the people*. Konsep demokrasi sebagai kedaulatan rakyat bertumpu pada prinsip bahwa rakyat secara keseluruhan dipandang sebagai landasan kehidupan politik. Rakyat merupakan sumber utama kewenangan dan kepentingan, serta kesejahteraan rakyat merupakan tujuan utama pemerintah. Berdasarkan istilah demokrasi menurut asal kata tersebut dapat diartikan bahwa demokrasi merupakan kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Demokrasi yang dianut Indonesia adalah salah satu bentuk demokrasi konstitusional yang disebut demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi konstitusional dengan mekanisme kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konstitusi yaitu Undang-undang Dasar 1945. Demokrasi Pancasila terikat dengan UUD 1945 dan pelaksanaannya harus sesuai dengan UUD 1945.

Demokrasi Pancasila mengandung nilai-nilai dan tujuan yang tertuang dalam sila-sila Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara merupakan pijakan bangsa Indonesia dalam menyelenggarakan kegiatan bernegara serta berperan dalam membangun demokrasi bangsa Indonesia. Pancasila dalam membangun demokrasi di Indonesia kiranya masih dalam taraf perkembangan, hal ini didukung oleh Miriam Budiardjo yang mengemukakan bahwa dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia masih ditandai dengan banyak sekali sifat-sifat dan ciri-cirinya terdapat pelbagai tafsiran serta pandangan yang berbeda (Budiardjo, 106: 2018).

Demokrasi sebagai suatu sistem politik di Indonesia merupakan bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya dalam mewujudkan kedaulatan rakyat secara penuh oleh negara yang dijalankan oleh pemerintah. Warga negara dalam konteks sistem politik demokrasi memiliki hak yang setara dalam setiap pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka di kehidupan politik. Demokrasi sebagai suatu sistem politik mengizinkan warga negaranya untuk berpartisipasi secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum di kehidupan masyarakat. Demokrasi sebagai suatu sistem politik hakikatnya mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan suatu negara melakukan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara setiap warga negaranya.

Dalam sistem politik demokrasi Pancasila, adanya peran warga negara dibidang politik sangatlah penting bagi keberlangsungan demokrasi di Indonesia. Peran warga negara dibidang politik ini sangat penting, mengingat bahwa peran warga negara dapat menciptakan ruang kebebasan atas pikiran dan berserikat. Kebebasan tersebut merupakan dasar dan menjadi faktor penentu dalam menumbuhkan kehidupan yang demokratis di Indonesia (Cholisin, 2004: 101). Demokrasi yang memiliki kebebasan berserikat dan kebebasan menyampaikan pendapat merupakan wujud kehidupan demokrasi menjadi lebih demokratis. Perwujudan kebebasan berserikat dan menyampaikan ini memberikan ruang kepada warga negara berevolusi menjadi masyarakat madani atau *civil society*.

Terbentuknya *civil society* secara historis telah muncul ketika proses transformasi akibat modernisasi yang menghasilkan pembentukan masyarakat yang berbeda dengan masyarakat sebelumnya (tradisional). Dalam perjalanan sejarah demokrasi di Indonesia, wacana *civil society* telah menjadi salah satu agenda utama dalam melepaskan kekecewaan dan ketidakpuasan masyarakat terhadap adanya praktik-praktik politik Orde Baru yang sangat *hegemonik* dalam pengelolaan social, ekonomi, budaya, dan politik.

Peneliti mengamati perkembangan demokrasi di Kabupaten Kotawaringin Barat, dan masih menemukan kurangnya kebijakan yang secara eksplisit membangun dan menguatkan masyarakat Kotawaringin Barat untuk memiliki kepribadian *civil society* baik dalam aspek basis

maupun cita-cita idealnya. Selain itu, Peneliti masih menemukan kurangnya kesadaran dari masyarakat secara mandiri; adanya masalah kebudayaan yang menginginkan adanya harmonisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang menyebabkan belum terbentuk secara utuh pikiran yang kritis atas kebijakan yang dibuat oleh pemerintah; kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) di dalam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau Organisasi Masyarakat.

Berdasarkan Instruksi Bupati Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat di Kabupaten Kulon Progo Untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 di Kabupaten Kulon Progo, maka dilakukanlah Penutupan Sementara Alun-Alun Wates pada Juli 2021 sampai Oktober 2021. Kemudian, berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 Pada Saat Natal 2021 dan Tahun Baru 2022, maka penutupan pada Alun-Alun Wates kembali diberlakukan pada 31 Desember 2021 sampai 1 Januari 2022 dengan tujuan mencegah kerumunan pada pergantian tahun baru 2022. Kebijakan Penutupan Sementara Alun-Alun Wates dilakukan dengan tujuan agar dapat menekan angka penyebaran Covid-19 dan mencegah kerumunan di ruang publik. Hal ini secara tidak langsung berdampak pada omset pedagang kaki lima yang menurun.

Sistem politik demokrasi Pancasila menjadi tuntutan masyarakat atas kepentingan politik sebagai implementasi dinamika politik lokal masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat, tuntutan ini menurut mekanisme sistem politik demokrasi harus memiliki dinamika dan aktor politik yang progresif dalam pembuatan keputusan publik serta memiliki kemampuan untuk mengakomodir berbagai tuntutan dari masyarakat di Kabupaten Kotawaringin barat dalam aspek penguatan *civil society*. Oleh karena itu pada tataran politik lokal, aktor politik lokal seperti anggota DPRD dan eksekutif pemerintahan seperti bupati beserta perangkat dinas dan birokrat memiliki peran yang penting dalam membangun *civil society* di Kotawaringin Barat. Aktor politik lokal wajib selalu bersemangat untuk menjemput berbagai tuntutan dan dukungan dari masyarakat dalam mewujudkan masyarakat Kotawaringin Barat ke arah *civil society* yang independen dan kritis terhadap setiap kebijakan, hal ini dimaksudkan untuk menciptakan masyarakat *civil society* yang memiliki keseimbangan tuntutan sehingga ada *balance of power* dalam kehidupan masyarakat pada konteks politik lokal. (Bailusy, 2000: 401).

Pada kondisi tertentu persoalan politik lokal dapat diperankan oleh aktor politik lokal dan kelompok-kelompok kepentingan yang ada di sekeliling aktor politik lokal. Aktor politik lokal serta kelompok kepentingan dalam hal ini mengaktikan kepentingan politik pada masyarakat umum dapat berlangsung secara berbeda-beda. Perbedaan ini disebabkan latar belakang ideologi yang dimiliki oleh setiap kelompok kepentingan dan dasar kepercayaan atas ideologi dari aktor kelompok kepentingan itu sendiri yang terekspresi dalam bentuk tingkah laku politik atau perilaku aktor politik lokal. Interaksi yang terjadi dalam kehidupan demokrasi di Kabupaten Kotawaringin Barat terlihat dari keterlibatan individu (warga Kabupaten Kotawaringin Barat) dengan aktor politik, aktor politik dengan kelompok kepentingan, dan kelompok kepentingan dengan partai politik, interaksi antara partai politik dengan Lembaga-Lembaga pemerintahan dalam upaya untuk merumuskan, memutuskan, atau melaksanakan keputusan politik (Bailusy, 2000: 403).

Peneliti mengamati aktor politik lokal di Kotawaringin Barat memiliki peran dan upaya dalam mewujudkannya pelaksanaan sosialisasi, pemberdayaan, dan edukasi politik dalam menguatkan *civil society* di Kotawaringin Barat. Peran dan upaya yang dilakukan oleh aktor politik lokal ini memiliki pengaruh terhadap kondisi politik dan penguatan *civil society* di Kotawaringin Barat. Peneliti menemukan adanya pelaksanaan penguatan *civil society* yang

diperankan dan diupayakan oleh aktor politik lokal menimbulkan beberapa efek positif terhadap kondisi politik di Kotawaringin Barat.

Civil society sebagai salah satu kajian PPKn memiliki peran penting dalam membangun sumber daya masyarakat secara umum. *Civil society* juga memiliki arti penting dalam membangun Pendidikan Kewarganegaraan di Kabupaten Kotawaringin Barat. *Civil society* di Kotawaringin Barat memiliki peran sebagai contoh konkrit membangun kesadaran dan partisipasi politik masyarakat di Kotawaringin Barat. Kesadaran dan partisipasi politik *civil society* memiliki pengaruh terhadap generasi penerus bangsa dalam melihat perilaku dan budaya yang berada di sekitar mereka, hal tersebut merupakan salah satu hubungan yang nyata bagaimana *civil society* membentuk masyarakat dari setiap kalangan tidak terkecuali generasi penerus bangsa.

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai permasalahan tersebut. Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti akan meneliti mengenai peran aktor politik lokal dalam penguatan *civil society* di Kabupaten Kotawaringin Barat. Penelitian ini menarik perhatian peneliti karena peneliti ingin mengembangkan dan memberikan kajian akademis serta praktis terhadap aktor politik lokal di Kabupaten Kotawaringin Barat dalam mengembangkan sifat dan ciri-cirinya di setiap kebijakan yang dilakukan kedepannya. Selain itu penelitian ini berkaitan pula dengan mata pelajaran PKn dimana hal ini juga sebagai salah satu referensi guru PKn dalam mengembangkan secara praktis warga negara yang bercirikan *civil society* lewat jalur pendidikan kewarganegaraan dalam mewujudkan *civil society* di Kotawaringin Barat. Guru PKn dapat memberikan contoh nyata atas setiap kebijakan, program pemerintah, program LSM dalam membangun generasi penerus bangsa yang memiliki daya kritis dan kemampuan kewarganegaraan yang diharapkan oleh bangsa.

Sehingga, berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, terdapat keunikan terkait permasalahan tersebut dan peneliti ingin melakukan penelitian yang lebih mendalam tentang bagaimana peran aktor politik lokal dalam penguatan *civil society* di Kabupaten Kotawaringin Barat dan apa saja upaya aktor politik lokal dalam menguatkan *civil society* di bidang kesadaran dan partisipasi politik Kabupaten Kotawaringin Barat. Sehingga diharapkan mampu memberikan kajian akademis yang kritis dalam membangun *civil society* yang lebih maksimal, berkualitas, serta mengedukasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi di Kabupaten Kotawaringin Barat. Judul penelitian yang akan peneliti usung adalah "Peran Aktor Politik Lokal Menguatkan *Civil Society* di Kabupaten Kotawaringin Barat".

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus untuk mencari informasi secara lebih mendalam dan mendetail mengenai bagaimana peran aktor politik lokal dalam penguatan *civil society* di Kabupaten Kotawaringin Barat. Data primer diambil dari Anggota DPRD Kotawaringin Barat (Informan Kunci), Kepala Kesbangpol Kotawaringin Barat (Informan Utama) dan organisasi kemasyarakatan/LSM di Kotawaringin Barat (Informan Pendukung). Data primer dikumpulkan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi serta data sekunder dikumpulkan melalui buku dan dokumen. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data secara induktif melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber dan teknik.

Hasil dan Pembahasan

1. Peran Aktor Politik Lokal dalam Penguatan *Civil society* di Kabupaten Kotawaringin Barat

a. Landasan, motivasi dan semangat aktor politik lokal dan *civil society*

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa landasan, motivasi, dan semangat utama masyarakat dalam membentuk serta menguatkan *civil society* di Kotawaringin Barat ialah membangun sumber daya manusia yang berkompeten dalam hal daya kritis, tanggap, berjiwa gotong royong, dan partisipasi politik. Wujud nyata semangat aktor politik lokal dalam menguatkan *civil society* ditandai dengan adanya program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh Kesbangpol sebagai wujud nyata peran aktor politik lokal dalam menguatkan *civil society* di Kotawaringin Barat.

Dalam sistem politik demokrasi, warga negara memiliki kebebasan penuh untuk menjalankan aktivitas kesehariannya, termasuk dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Dalam menjalankan kesehariannya, warga negara perlu memperhatikan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Hak dan kewajiban warga negara harus memiliki landasan dalam menjalankannya sehingga tidak mengganggu hak orang lain.

Setiap warga negara memiliki landasan dalam menjalankan haknya sebagai warga negara. Menurut peneliti, landasan merupakan suatu tumpuan, pijakan, batu loncatan atau alasan dibalik terjadinya sesuatu, sebagai contoh yakni terwujudnya *civil society*. *Civil society* tentu memiliki landasan, motivasi, dan semangat dalam membangun dan mengembangkan organisasinya.

Semangat dalam membangun sumber daya manusia yang berkompeten tidak hanya dalam bidang sosial ekonomi saja namun bidang politik ini sebagai bentuk membangun masyarakat madani yang kritis dan memiliki kesadaran serta partisipasi politik yang tinggi dalam membangun kehidupan yang demokratis. Semangat persatuan, toleransi, dan gotong royong juga merupakan aspek penting yang perlu ditingkatkan dalam membangun dan menguatkan *civil society* di Kotawaringin Barat. Namun, faktanya landasan membangun sumber daya manusia yang kompeten ini tidak hanya dalam *civil society* saja. Hakikatnya, aktor politik lokal di Kotawaringin Barat memiliki landasan, semangat, motivasi dan peran aktif yang memiliki daya dorong yang kuat terutama dalam penguatan *civil society* di bidang kesadaran dan partisipasi politik.

Peran aktor politik lokal dalam membangun dan menguatkan *civil society* di Kotawaringin Barat perlu dikuatkan melalui penguatan landasan *civil society* itu sendiri terutama pada prinsip-prinsip toleransi, desentralisasi, kewarganegaraan, aktivisme dalam ruang publik, sukarela, swasembada, swadaya, otonom, dan konstitusionalisme (Karni, 1999: 31). Penguatan *civil society* melalui landasan penguatan *civil society* hakikatnya perlu dikuatkan oleh dua pihak yakni pemerintah dan *civil society* itu sendiri, tanpa adanya landasan positif yang dimiliki internal *civil society* dalam bidang kesadaran dan partisipasi politik, tidak akan memberikan efek positif dalam kehidupan demokrasi di Kabupaten Kotawaringin Barat dan sebaliknya, apabila aktor politik lokal tidak memiliki landasan yang kuat dalam menguatkan *civil society*, maka kehidupan demokrasi tidak akan berjalan dengan baik.

b. Dialog antara aktor politik lokal dengan *civil society* di Kotawaringin Barat

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, peneliti menemukan pelaksanaannya dialog antara aktor politik lokal dengan *civil society* di Kotawaringin Barat terjalin komunikasi yang sangat baik. Komunikasi yang baik antara aktor politik lokal dengan *civil society* di Kotawaringin Barat didukung dengan adanya kemudahan akses diskusi baik

secara personal maupun dengan DPRD secara kelembagaan, sebagai pemenuhan atas kesadaran dan partisipasi politik sebagai warga negara.

Faedlulloh (dalam Efendi&dkk, 2019: 25), mengemukakan bahwa masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya, hal ini juga berlaku terhadap peranan *civil society* di Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai ruang publik untuk memberikan akses penuh terhadap setiap kegiatan publik atas bentuk hak dalam melakukan kegiatan secara merdeka (bebas) dalam menyampaikan pendapat di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Keterbukaan ruang publik yang dilakukan oleh aktor politik lokal juga merupakan bentuk fungsi partai politik yakni sebagai sarana komunikasi politik. Sigmund Neumann (dalam Budiardjo, 2018: 406), mengemukakan bahwa dalam hubungan komunikasi politik, partai politik merupakan suatu perantara (*broker*) yang besar dalam menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga pemerintah yang resmi serta partai politik ini mengaitkan dirinya dengan aksi politik di dalam kehidupan masyarakat politik yang lebih luas.

Keterbukaan ruang publik yang dilakukan aktor politik lokal kepada *civil society* merupakan salah satu bentuk penguatan dan peran yang dilakukan oleh aktor politik maupun elite politik lokal kepada *civil society*. Aktor politik lokal berfokus menguatkan karakteristik dan unsur-unsur sosial yang menjadi prasyarat terwujudnya tatanan *civil society*, dalam hal ini keterbukaan ruang publik menjadi salah satu cara aktor politik lokal dalam menguatkan *civil society*. Penguatan yang dilakukan oleh aktor politik lokal terhadap beberapa unsur pokok dan khas pembentukan *civil society* yang meliputi: wilayah publik yang bebas (*Free Public Sphere*), demokrasi, toleransi, kemajemukan, dan keadilan sosial memberikan hasil dan dampak yang positif dalam menguatkan *civil society* di Kotawaringin Barat (Fazarianto, 2011: 9-12).

Penguatan *civil society* dengan adanya keterbukaan ruang publik yang bebas merupakan salah satu bentuk peran dan upaya aktor politik lokal sebagai pondasi dalam penguatan *civil society* yang ada di Kotawaringin Barat. Keterbukaan ruang publik ini meningkatkan daya pikir kritis dan kesadaran serta partisipasi politik masyarakat secara keseluruhan untuk menjalankan hak sebagai warga negara atas segala fenomena politik yang terjadi di Kabupaten Kotawaringin Barat. Menurut peneliti, keterbukaan ruang publik yang bebas ini juga membangkitkan semangat demokrasi Pancasila yakni, semangat demokrasi Pancasila yang dipegang teguh oleh setiap warga negara Indonesia yang di dalamnya memiliki nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, hal ini termasuk adanya nilai-nilai luhur dan pegangan terhadap agama, toleransi, persatuan atas kemajemukan, demokrasi serta adanya keadilan sosial sebagai penguatan karakteristik *civil society* di Kotawaringin Barat.

c. Keterlibatan, peran dan partisipasi masyarakat di kehidupan demokrasi dalam penguatan *civil society* di Kotawaringin Barat

Hasil penelitian menunjukkan peningkatan kesadaran dan partisipasi politik masyarakat didorong atas pemberdayaan *civil society* yang dilakukan oleh elit politik yakni Kesbangpol dan Anggota DPRD Kotawaringin Barat. Peningkatan kesadaran dan partisipasi politik ini ditandai dengan adanya rapat berkala dan konsisten yang dilakukan oleh Kesbangpol kepada *civil society* dan keterbukaan dialog oleh DPRD yang meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik *civil society* dalam memberikan kritik.

Civil society merupakan suatu elemen penting dalam mewujudkan suatu masyarakat madani. *Civil society* harus menunjukkan sikap dan derajat budaya tertentu dalam kehidupan politik di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, peneliti berpendapat bahwa kunci atau dasar utama dalam membangun *civil society* yang baik ialah dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara tidak hanya diwarnai oleh pemerintah atau elit politik, tetapi

oleh berbagai kekuatan masyarakat yang dimiliki masyarakat tersebut. Masyarakat yang memiliki kekuatan dalam segi karakteristiknya sebagai *civil society* tentunya mempunyai tingkat derajat toleransi yang tinggi terhadap tindakan orang lain, didukung oleh wawasan yang luas yang dimilikinya serta sikap dan perilaku terhadap norma-norma yang berlaku dalam tatanan masyarakat. Dalam mewujudkan cita-cita *civil society* ini keterlibatan masyarakat dalam kehidupan demokrasi bangsa tentu perlu ditingkatkan. Keterlibatan dalam kehidupan demokrasi di Kotawaringin Barat hakikatnya tidak lepas kaitannya dengan kesadaran dan partisipasi politik di masyarakat Kotawaringin Barat itu sendiri.

Miriam Budiardjo mengemukakan bahwa, kesadaran politik adalah perasaan individu terhadap keadaan diperintah dan percaya bahwa individu dapat sedikit atau banyak mempengaruhi kebijakan pemegang kekuasaan atau percaya bahwa mereka memiliki efek politik dalam kehidupan demokrasi (Lila, 2018: 14).

Peneliti melihat bahwa kesadaran politik berhubungan dengan kesadaran individu dalam mendapatkan pengetahuan dan pemahaman seseorang terhadap sistem politik berkaitan dengan komponen orientasi kognitif. Menurut peneliti ditahap ini, masyarakat Kotawaringin Barat mengetahui secara sadar atas hak dan kewajibannya sebagai warga negara sebagaimana yang dijamin oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, seperti bagaimana seseorang dapat mengetahui tata cara pemilu, memahami setiap kebijakan-kebijakan dari berita, mengetahui pemimpin negara atau daerah lokalnya, bahkan memahami dan mengetahui bagaimana hak-haknya sebagai warga negara dapat diimplementasikan.

Keterlibatan, partisipasi, dan peran masyarakat dalam menguatkan *civil society* tidak lepas dari kesadaran politik sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, bentuk nyata penguatan *civil society* yang ditandai dengan adanya kesadaran politik yang mulai menguat di masyarakat Kotawaringin Barat. Kesadaran politik yang disebutkan merupakan suatu kondisi dimana masyarakat secara keseluruhan termasuk *civil society* di Kotawaringin Barat mendapati pemahaman tentang pengetahuan yang terjadi atas politik, nilai-nilai masyarakat, dan orientasi politik, yang mendorong sikap seseorang untuk mencari solusi atau tindakan yang diambil dari berbagai permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, memberikan keputusan atas tindakan yang dipahaminya serta menentukan sikap terhadap permasalahan yang terjadi di masyarakat, yang mendorong individu untuk mengembangkan dan melaksanakan sebagai bentuk keputusannya.

Peningkatan kesadaran dan partisipasi politik yang didorong atas pemberdayaan *civil society*, rapat berkala, keterbukaan dialog serta permasalahan yang terjadi dalam lingkungan politik yang dilakukan oleh aktor politik yang memiliki dampak kuat dalam menguatkan *civil society* di Kotawaringin Barat. Peningkatan kesadaran dan partisipasi politik ini merupakan salah satu bentuk nyata peran aktor politik lokal dalam menguatkan *civil society*.

d. Peran aktor politik lokal dalam penguatan *civil society* di Kotawaringin Barat

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, peneliti menemukan bahwa peranan aktor politik lokal di Kotawaringin Barat sangat baik. Dalam pelaksanaannya terdapat penguatan pada aspek demokrasi, pendanaan, hibah kepada *civil society*, monitoring, pemberdayaan *civil society*, sosialisasi politik, edukasi, toleransi, kemajemukan, dan keterbukaan ruang terhadap publik. Penguatan *civil society* terlihat dalam pembinaan yang dilakukan aktor politik lokal untuk mengajak *civil society* mewujudkan dan menguatkan kesadaran dan partisipasi politik *civil society* di Kotawaringin Barat.

Penguatan *civil society* yang dilakukan oleh aktor politik lokal di Kotawaringin Barat dalam era reformasi yang ditandai dengan adanya rasa memperjuangkan dan menguatkan kesadaran politik bahwa hakikatnya *civil society* memiliki hak untuk bertindak dan berbuat sesuatu bahkan berpartisipasi untuk melakukan perubahan-perubahan ke arah kehidupan yang lebih demokratis. Dalam misi reformasi, masyarakat harus melakukan perubahan-perubahan atas ketakutan berpolitik dan pendobrakan atas pembodohan yang terjadi selama kurang lebih tiga puluh dua tahun pada masa presiden Soeharto.

Era reformasi memberikan aktor politik lokal di Kotawaringin Barat kekuasaan dan peran dalam menguatkan *civil society*. Kekuasaan dan peranan aktor politik lokal secara jelas terlihat dari adanya kebebasan daerah untuk mengurus daerahnya masing-masing atau desentralisasi. Kebebasan ini memberikan ruang kepada aktor politik lokal untuk mengembangkan kehidupan demokrasi di daerahnya masing-masing termasuk dalam menguatkan *civil society* di Kotawaringin Barat. Aktor politik lokal sebagai representasi masyarakat dalam penguatan *civil society* di Kotawaringin barat memiliki peranan yang kuat dalam meningkatkan pelayanan publik, keterbukaan ruang publik, demokrasi yang dilandaskan oleh Pancasila, peningkatan pluralisme dan toleransi, peningkatan kesejahteraan dan keadilan sosial dengan perumusan kebijakan publik, serta memberikan anggaran dan monitoring kepada setiap aspirasi masyarakat. Peran aktor politik lokal dalam menguatkan *civil society* terutama dalam menyempurnakan bentuk dan ragam *civil society* yang aktif, kritis, dan partisipatif masih terus berkembang dalam dinamika politik lokal. Dinamika perkembangan ini masih terus berlanjut mengingat bahwa era reformasi masih berjalan hingga saat ini.

Dinamika politik lokal dalam penguatan *civil society* yang dilakukan oleh aktor politik lokal ini hakikatnya membuka ruang politik untuk terciptanya *good governance* yang dapat mengatasi adanya permasalahan-permasalahan yang ada di Kotawaringin Barat. Peran yang dilakukan oleh aktor politik lokal dalam menguatkan *civil society* dibantu oleh seluruh elemen masyarakat dan publik melalui Organisasi Masyarakat dan LSM di Kotawaringin Barat yang dapat membangun dan memperluas jangkauan kemampuan *good governance*.

Keberhasilan meningkatkan kesadaran politik *civil society* menguatkan kemampuan *good governance* dalam kehidupan demokrasi di Kabupaten Kotawaringin Barat. Penguatan *good governance* tersebut terlihat dari adanya peranan aktif dalam menyampaikan aspirasi dan kritik masyarakat kepada elite politik lokal di Kotawaringin Barat yang selalu dalam *monitoring* masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat. Menurut peneliti, *monitoring* yang dilakukan oleh masyarakat merupakan salah satu contoh adanya pengawasan nyata oleh rakyat kepada elite politik lokal yang ada di Kotawaringin Barat sebagai bentuk mempengaruhi kebijakan publik di Kotawaringin Barat, dari hasil penelitian ini dapat dikatakan *civil society* mengalami adanya peningkatan kesadaran politik dan partisipasi politik.

Berdasarkan hasil penelitian, aktor politik lokal sadar atas adanya pengawasan atau *monitoring* yang dilakukan oleh masyarakat di Kotawaringin Barat. Sebagai contoh konkrit peneliti pada saat menghadiri Rapat Paripurna ke-2 Masa Sidang II Tahun 2022 dalam rangka Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kotawaringin Barat terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021, *civil society* memberikan kritik kepada aktor politik lokal terutama dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 yang secara terbuka kepada masyarakat Kotawaringin Barat. Dalam forum tersebut anggota DPRD yang mewakili fraksinya menyampaikan aspirasi dan kritikan masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat. Keterbukaan atas kritikan dan aspirasi masyarakat Kotawaringin Barat yang dilakukan oleh aktor politik lokal merupakan salah satu bentuk peran bagaimana aktor politik politik lokal membangun penguatan *civil society* di Kotawaringin Barat

dalam berpikir kritis masyarakat dan melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi dan menyampaikan kritikan kepada aktor politik lokal ketika terdapat ketidakpuasan terhadap kinerja aktor politik lokal.

Keterbukaan atas kritikan dan aspirasi masyarakat juga merupakan fungsi partai politik yang diamanahkan kepada para aktor politik lokal sebagai wadah atau penampung aspirasi rakyat. Partai politik memiliki fungsi untuk menampung setiap kepentingan atau bisa disebut sebagai *interest aggregation*. Setelah tertampung dan digabungkan beberapa pendapat tersebut diolah menjadi sesuatu yang lebih teratur, proses ini disebut sebagai perumusan kepentingan atau *interest articulation*. Setelah terkumpul dan diartikulasi, partai politik merumuskan aspirasi tersebut menjadi suatu usul kebijakan. Usul kebijakan yang sudah dirumuskan ini dimasukkan ke dalam program partai dan diperjuangkan melalui parlemen kepada pemerintah agar supaya dijadikan kebijakan umum (*public policy*).

Menurut peneliti, adanya keterbukaan ruang kritikan terhadap aktor politik lokal yang dilakukan oleh *civil society* di Kotawaringin Barat merupakan salah satu bentuk nyata pengawasan rakyat kepada penguasa atau pemerintah daerah. Keterbukaan ruang publik dan demokrasi ini yang menjadi salah satu bentuk nyata peran aktor politik lokal terhadap adanya penguatan *civil society* yang dilakukan aktor politik lokal di Kotawaringin Barat.

Kritik kepada aktor politik lokal merupakan bentuk partisipasi aktif *civil society* dalam kehidupan demokrasi di Kabupaten Kotawaringin Barat. Cholisin dan Nasiwan mengemukakan, bahwa partisipasi politik aktif merupakan kegiatan yang secara nyata berorientasi pada *input* dan *output* politik (Cholisin & Nasiwan, 2012: 147). Partisipasi politik *civil society* dalam praktiknya dikuatkan oleh aktor politik lokal terutama dalam aspek edukasi politik dan pemberdayaan *civil society* dalam membangun penguatan *civil society* di masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat. Edukasi politik yang diberikan oleh aktor politik lokal kepada *civil society* yakni untuk selalu mendasarkan pemilu dengan asas Langsung, Umum, Bebas, Jujur, dan Adil (Luber Jurdil), selalu mengawasi kinerja pemerintah, selalu berani untuk membuka dialog kepada penguasa, toleransi, menghargai kemajemukan, demokratis serta selalu berorientasi kepada keadilan sosial. Pemberdayaan *civil society* yang dilakukan oleh Kesbangpol selaku aktor politik lokal birokrasi yakni dengan pemberdayaan berbasis monitoring *civil society* dan keterbukaan atas setiap masalah dan kegiatan yang akan dilakukan oleh *civil society* sebagai salah satu cara untuk memantau bagaimana *civil society* ini berkembang dan mengalami penguatan terhadap karakteristik *civil society* itu sendiri.

2. Upaya aktor politik lokal dalam penguatan *civil society* di bidang kesadaran dan partisipasi politik di Kabupaten Kotawaringin Barat

a) Program dan upaya aktor politik lokal dan *civil society* di Kotawaringin Barat dan penguatan *civil society* dalam kesadaran politik dan partisipasi politik

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, peneliti menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa program *civil society* antara lain menyalurkan aspirasi, pemberdayaan anggotanya, dan partisipasi politiknya dalam menjaga demokrasi dan kemajemukan di Kotawaringin Barat. Namun hal ini tentu di dorong oleh aktor politik lokal sebagai bentuk upaya aktor politik lokal dalam menguatkan *civil society* di Kotawaringin Barat yang terlihat dari program-program yang dilakukan oleh aktor politik lokal serta memiliki pengaruh terhadap peningkatan kesadaran dan partisipasi politik. Berdasarkan data tersebut, program-program yang dilakukan oleh elite politik yakni adanya Program Rapat berkala, pemberdayaan *civil society*, edukasi politik dan etika politik serta dibuatnya forum komunikasi yang memudahkan *civil society* untuk melaksanakan komunikasi merupakan bentuk upaya aktor politik lokal dalam menguatkan *civil society* di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Penguatan *civil society* yang diawali dengan kesadaran politik dan sosial sebagai warga negara. Penguatan kesadaran politik dan sosial ini merupakan pijakan atau landasan awal bagaimana *civil society* ini menguat dan berkembang. Upaya-upaya yang disebutkan tersebut hakikatnya mendorong *civil society* untuk berpartisipasi aktif dalam melaksanakan kewajiban dan hak nya sebagai warga negara.

Beberapa upaya yang telah dilakukan sebagaimana yang peneliti temukan pada aktor politik lokal ini didukung pula dengan penguatan atas unsur pokok yang harus dimiliki dalam pembentukan *civil society* antara lain meliputi: wilayah publik yang bebas (*Free Public Sphere*), demokrasi, toleransi, kemajemukan, dan keadilan sosial (Fazarianto, 2011: 9-12).

Upaya dalam menguatkan *civil society* melalui aspek demokrasi dengan mendorong peningkatan kesadaran dan partisipasi politik di Kotawaringin Barat. Menurut peneliti, kesadaran politik sebagai sebuah pemahaman individu terhadap suatu keadaan politik dan pemenuhan haknya sebagai warga negara dalam melihat kondisi politik yang ada di masyarakat sekitarnya memiliki dampak bagi kehidupan demokrasi di Kotawaringin Barat. Upaya yang dilakukan oleh aktor politik lokal di Kotawaringin Barat dengan membentuk penguatan *civil society* yang diawali dengan kesadaran politik dan sosial sebagai warga negara. Penguatan kesadaran politik dan sosial ini merupakan pijakan atau landasan awal bagaimana *civil society* ini menguat dan berkembang. Upaya-upaya yang disebutkan tersebut hakikatnya mendorong *civil society* untuk berpartisipasi aktif dalam melaksanakan kewajiban dan hak nya sebagai warga negara.

Upaya aktor politik lokal di Kotawaringin Barat menguatkan *civil society* ini merupakan salah satu upaya demi menjaga konstelasi politik di Kotawaringin Barat. Upaya aktor politik lokal ini mendorong masyarakat termasuk *civil society* untuk memiliki kesadaran dan partisipasi politik yang tinggi. Kesadaran dan partisipasi politik yang tinggi diyakini oleh *civil society* maupun aktor politik lokal sebagai langkah yang tepat dalam membangun kehidupan demokrasi yang tinggi dan dicita-citakan oleh demokrasi Pancasila.

Upaya yang dilakukan oleh aktor politik lokal ini hakikatnya diteruskan ke dalam beberapa program *civil society* antara lain menyalurkan aspirasi, pemberdayaan anggotanya, dan partisipasi politiknya dalam menjaga demokrasi dan kemajemukan di Kotawaringin Barat. Program-program yang dilakukan oleh *civil society* ini merupakan bukti terciptanya peran aktor politik lokal dalam menguatkan *civil society* melalui pemberdayaan *civil society* dan edukasi politik.

Civil society sebagai organisasi yang mandiri memiliki fungsi untuk mengkritisi kebijakan-kebijakan yang bersifat diskriminatif yang dikeluarkan pihak penguasa dan juga mampu untuk turut memperjuangkan berbagai inspirasi dari masyarakat yang tertindas. *Civil society* hakikatnya juga memiliki kewajiban membantu dan memperjuangkan aspirasi; mengkritisi dan menjadi bagian dari kontrol sosial; menjunjung supremasi hukum (Agung, 2010: 270). Menurut peneliti, pemberdayaan yang dilakukan oleh *civil society* juga merupakan salah satu bentuk upaya dari *civil society* secara internal serta bagaimana *civil society* itu membangun dan membentuk masyarakat yang kritis terhadap setiap kebijakan ataupun program yang dilaksanakan oleh aktor politik lokal.

Program-program atau upaya yang dilakukan oleh aktor politik lokal dengan menciptakan rapat berkala, pemberdayaan *civil society*, edukasi politik dan etika politik serta dibuatnya forum komunikasi yang memudahkan *civil society* untuk melaksanakan komunikasi membuka kesempatan aktor politik lokal untuk menguatkan *civil society*. Program-program

yang dilakukan oleh aktor politik lokal tersebut memiliki pengaruh terhadap peningkatan kesadaran dan partisipasi politik.

Menurut peneliti, program-program yang diupayakan tersebut memiliki keterkaitan erat dengan kekuasaan aktor politik lokal. Kekuasaan yang dapat diartikan sebagai kemampuan seorang pelaku untuk mempengaruhi perilaku orang lain atau pelaku lain, sehingga perilakunya menjadi sesuai sebagaimana yang diinginkan pelaku yang memiliki kekuasaan atas sesuatu (Budiardjo, 2018: 60). Keterkaitan ini menurut peneliti mendorong aktor politik lokal untuk menjalankan upaya atau program dalam menguatkan *civil society* itu sendiri. Menurut peneliti, kekuasaan mendorong aktor politik lokal untuk berupaya menguatkan *civil society* dan masyarakat dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik sebagai langkah atau pondasi utama dalam melaksanakan kegiatan demokrasi serta sebagai salah satu upaya untuk merebut simpati masyarakat. Penguatan *civil society* melalui program-program atau upaya yang dilakukan oleh aktor politik lokal ini merupakan bentuk penguatan karakteristik *civil society* dalam menguatkan kehidupan demokrasi di Kotawaringin Barat.

b. Program dan upaya *civil society* dan aktor politik lokal di Kotawaringin Barat serta hasil yang didapatkan oleh masyarakat dalam bidang kesadaran dan partisipasi politik

Berdasarkan hasil penelitian wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan peneliti, peneliti menyimpulkan bahwa keberhasilan dari upaya dan program dalam meningkatkan dan menguatkan *civil society* ini tidak lepas kaitannya dengan keberhasilan upaya dan program-program yang dilakukan oleh anggota DPRD Kotawaringin Barat dan Kesbangpol yang didukung oleh *civil society*. Program-program yang dilakukan oleh aktor politik lokal dalam rangka sebagai upaya menghasilkan kesadaran dan partisipasi politik di Kotawaringin Barat. Upaya aktor politik lokal dalam pelaksanaan pembinaan *civil society* serta edukasi mengenai budaya dan etika politik secara nyata dan konsisten ini mendorong adanya penguatan *civil society* sebagai penyalur aspirasi masyarakat dalam mempengaruhi kebijakan publik.

Aktor politik lokal memiliki peran penting dalam memberdayakan *civil society*. Berdasarkan hasil penelitian, program-program yang dilakukan oleh elite politik lokal ditujukan untuk menghasilkan kesadaran dan partisipasi politik di Kotawaringin Barat. Menurut Hoogerwerf kebijakan umum adalah membangun masyarakat secara terarah melalui pemakaian kekuasaan (dalam Budiardjo, 2018: 21). Berdasarkan Hoogerwerf, peneliti melihat bahwa aktor politik lokal memiliki kemampuan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik *civil society* sehingga dapat terciptanya sistem pemerintahan yang demokratis.

Menurut Agung, dalam penciptaan sistem pemerintahan yang demokratis tidak dapat didasarkan semata pada niat baik dari si pemegang kekuasaan, tetapi juga perlu didukung oleh tindakan nyata untuk menciptakan dan membangun kondisi dan situasi demokratis tersebut (Agung, 2010: 269). Berdasarkan hasil penelitian, peneliti berpandangan bahwa upaya dalam menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis mesti dilakukan juga oleh masyarakat luas, khususnya melalui penguatan potensi-potensi yang ada terutama pemberdayaan *civil society* di Kotawaringin Barat. Upaya pemberdayaan masyarakat hingga menjadi kekuatan *civil society* di Kotawaringin Barat pada dasarnya mengarah pada penciptaan pola kekuasaan masyarakat demokratis.

Menurut peneliti penciptaan sistem demokrasi yang baik tentu harus didukung dengan keseimbangan dalam ruang demokrasi. Upaya yang dilakukan oleh aktor politik lokal ini memiliki dampak dalam menguatkan karakteristik *civil society* sebagai langkah penguatan identitas dan peran *civil society* di ruang demokrasi.

Penguatan *civil society* dalam bidang kesadaran dan partisipasi politik sebagai pondasi dalam kegiatan demokrasi telah berhasil meningkat. Keberhasilan peran aktor politik lokal dalam menguatkan *civil society* terutama dalam bidang kesadaran dan partisipasi politik yang kuat membawa *civil society* menguatkan karakteristik *civil society* antara lain dengan menciptakan diskusi ruang publik, kemajemukan, demokrasi, keadilan sosial dan toleransi dalam kehidupan demokrasi. Beberapa upaya yang dijalankan oleh aktor politik lokal melalui beberapa program yang dilakukan tersebut membawa hasil yang baik dalam menguatkan *civil society* terutama dalam bidang kesadaran dan partisipasi politik di Kotawaringin Barat.

Referensi

- Karni, Asrori S. 1999. *Civil society & Ummah*. Jakarta: Logos.
- Budiardjo, Miriam. 2018. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Cholisin dan Nasiwan, 2012. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta
- Efendi, Heni Nur & dkk. 2019. *Dinamika Peran Civil society Dalam Ruang Publik: Studi WALHI Lampung*. FISIP Universitas Lampung: Jurnal Administrativa. Vol. 1, No. 1. Diakses pada <http://repository.lppm.unila.ac.id/33371/1/3%20DINAMIKA%20PERAN%20CIVIL%20SOCIETY%20DALAM%20RUANG%20PUBLIK%20STUDI%20WALHI%20LAMPUNG.pdf>
- Fazarianto, A. 2011. *Teorisasi demokrasi, negara bangsa, dan masyarakat madani dalam perspektif Undang-Undang Dasar 1945*. Surakarta: Universitas Jendral Soedirman. Diakses melalui <http://repository.ut.ac.id/2540/1/fisip201101.pdf> pada tanggal 20 April 2022.
- Nurbaiti, Lila. 2018. *Skripsi: Kesadaran Politik dan Partisipasi Politik Pengaruh Tingkat Kesadaran Politik Terhadap Partisipasi Politik Pemilih Pemula Kelurahan Tajur Pada Pilkada Kota Tangerang Tahun 2018*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Diakses pada <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/49273/1/LILA%20NURBAITI.FISIP.pdf>
- Agung, Iskandar dan Rumlina. 2010. *Civil society dan Pendidikan Karakter Bangsa*. Kementerian Pendidikan Nasional: Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Vol. 16, Edisi Khusus II. Diakses pada <https://jurnaldikbud.kemdikbud.go.id/index.php/jpnk/article/download/518/357/>

LEMBAR PENGESAHAN JURNAL

Judul : Peran Aktor Politik Lokal Menguatkan *Civil Society* di Kabupaten
Kotawaringin Barat

Nama : Arya Pangestu Ramadani

NIM : 18401241034

Prodi : Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum



Yogyakarta, 22 Desember 2022

Reviewer

Pembimbing

Dr. Suharno, M.Si.

Dr. Nasiwan, M.Si.

NIP. 196804172000031001

NIP. 196504172002121001

Rekomendasi Dosen Pembimbing (mohon dilingkari salah satu)

- ① Dikirim ke Journal Student "AGORA"
2. Dikirim ke Journal Civics
3. Dikirim ke Journal lain